

Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata Gerbang Banyu Langit di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

Besti Kusumawati (1), Tri Nugroho (2)

(1) Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia

(2) Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia

Email Korespondensi: trinugroho822@gmail.com

Abstrak: Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo, Piyungan, Bantul dilakukan mulai tahun 2019. Pada kenyataannya, banyak menghadapi kendala seperti: keterbatasan sumber daya manusia, dana yang tidak mencukupi, dan minimnya regulasi yang dijadikan acuan untuk implementasi. Rumusan masalah adalah: bagaimana peningkatan kapasitas desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo, Piyungan, Bantul dilaksanakan dan apa masalah yang dihadapi. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan objek penelitian desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo melalui Pokdarwis, pengelola, dan masyarakat. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan jumlah informan 12 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data digunakan analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo efektif karena: 1) Bina manusia, desa Srimulyo mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia; 2) Bina usaha, dilakukan dengan pemasaran melalui administrasi digital yang melibatkan komunitas dan lembaga di atasnya; 3) Bina lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Srimulyo dengan meningkatkan potensi lingkungan, melaksanakan visi desa, pelaksanaan sapta pesona; 4) Bina lembaga yang dilakukan oleh perangkat desa Srimulyo dengan mengimplementasikan visi organisasi yaitu menyadarkan masyarakat tentang pariwisata. Namun, menemui beberapa kendala: 1) terbatasnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia; 2) bina usaha kurang sempurna karena pemasarannya kurang luas; 3) fasilitas pariwisata yang kurang memadai; 4) desa belum memiliki peraturan tentang pengelolaan pariwisata.

Kata kunci; Peningkatan Kapasitas; Manajer; Pariwisata..

Abstract: *The capacity increase of manager of tourism village Gerbang Banyu Langit in Srimulyo, Piyungan, Bantul was done from 2019. In reality, it faced many problems such as: limited human resources, not enough funding, and the lack of regulations that is used as reference for the implementation. The problem statements are: how the capacity increase in tourism village Gerbang Banyu Langit in Srimulyo, Piyungan, Bantul was implemented and what are the problems it faced. Research Method: This research used a descriptive-qualitative method with the object of research is tourism village Gerbang Banyu Langit in Srimulyo through Pokdarwis, managers, and the community. It used purposive technique to select the informant, with 12 informants. For the data collection technique, it used observation, interview, and documentation. For the data analysis technique, it used interactive analysis that includes data reduction, data presentation, and conclusion. The capacity increase of manager of tourism village Gerbang Banyu Langit in Srimulyo is effective because: 1) Bina manusia, Srimulyo village held trainings to increase the human resources' skills; 2) Bina usaha, it is done with marketing through digital administration involving communities and institutions above it; 3) Bina lingkungan that is done by Srimulyo village administration by increasing environmental potentials, implementing the village vision, implementation of sapta pesona; 4) Bina lembaga that is done by Srimulyo village administration by implementing the organization's visions, making the public to be aware of tourism. However, it encountered several problems: 1) the trainings to increase the human resources' skills is limited; 2) the bina usaha is less than perfect because the marketing is not wide enough; 3) the tourism facilities are inadequate; 4) the village has not had regulations about tourism management.*

Keywords: Capacity Increase; Manager Of Tourism.

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-04-12



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kepulauan. Kepulauan tersebut terdiri dari pedesaan dan perkotaan. Wilayah pedesaan lebih luas daripada wilayah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 jumlah desa di Indonesia mencapai 83.820 desa, sedangkan untuk wilayah Yogyakarta sendiri terdiri dari 438 desa. Desa terdiri dari kelompok masyarakat yang berada disuatu wilayah dimana letak wilayahnya merupakan lahan terbuka hijau berupa sawah, pegunungan dan kenampakan alam lainnya. Luas wilayah desa tidaklah sama antara satu dengan yang lain. Begitu pula kenampakan alamnya. Setiap desa mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang sebagian besar berada di dataran tinggi, dan sebagian besar berada di wilayah dataran rendah. Kenampakan alam yang ditemui berbeda-beda, ada yang berupa pantai, pegunungan, hutan, sawah dan sungai. Berdasarkan perkembangan masyarakatnya, kondisi masing-masing desa berbeda. Terdapat desa yang kondisi masyarakatnya maju dan sudah mengenal modernisasi. Ada pula desa dengan masyarakatnya tradisional atau tingkat pendidikannya rendah. Semua itu berpengaruh terhadap kondisi kemajuan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa turut serta berperan dalam sistem perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada banyak cara dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan. Perlunya peran dari semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Didukung oleh pemerintah dalam mewujudkan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan harus dilakukan secara berkesinambungan agar bisa bertahan dan diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat terus menerus dilakukan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat dan kehidupan bangsa agar lebih baik lagi.

Tuntutan perubahan zaman harus disikapi dengan cermat. Setiap individu dan masyarakat dituntut untuk meningkatkan kemampuan sesuai tuntutan perkembangan zaman agar taraf hidupnya lebih sejahtera. Inovasi dan kreatifitas sangat diperlukan ditengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Perubahan itu terus bergulir dengan sangat cepat, adaptasi sangat diperlukan sebagai langkah penyesuaian. Bila tidak mampu menyesuaikan, akan timbul masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan yang rendah, dan masalah sosial lainnya.

Desa atau sekarang yang berganti nama menjadi Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan bahwa Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Pemberdayaan masyarakat desa wisata merupakan salah satu upaya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Aksi pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar dapat mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai program kegiatan salah satunya adalah program desa wisata. Pengembangan Desa Wisata sebagai program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan daya sekaligus sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengangkat berbagai macam potensi lokal yang ada di daerah tersebut, melalui desa wisata masyarakat diuntungkan dengan adanya pemasukan ekonomi dari pengelolaan berbagai macam aset dan potensi wilayah. Banyak keunggulan yang ditampilkan dalam desa wisata antara lain karakteristik wilayah berupa kenampakan alam, budaya kearifan lokal, seni tradisi serta ciri khas unggulan di daerah tersebut yang dikelola dan mempunyai nilai jual tinggi. Adanya program desa wisata akan memberikan manfaat-manfaat yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat didalamnya serta mengangkat potensi wilayah.

Kemajuan desa wisata tak lepas dari peran masyarakat dan pengelola wisata. Pengelola harus mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan program pemberdayaan desa wisata. Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi. Semua itu menjadi tolok ukur dan pemicu semangat bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan memajukan kalurahan dengan mengolah berbagai potensi yang ada sehingga memiliki nilai jual. Kalurahan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur kewenangannya sendiri, termasuk mengatur dan mengelola asset wilayah sehingga mampu memunculkan sumber-sumber keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program desa wisata yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

masyarakat didukung oleh sumber daya manusia yang baik, terutama semua masyarakat yang terlibat didalamnya. Sinergi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dalam hal ini ditingkat desa diwakili oleh pemerintah kalurahan, kelompok sadar wisata, pengelola dan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa wisata. Pengelola desa wisata harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni agar program desa wisata dari Pemerintah Kalurahan bisa terlaksana dengan baik.

Tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti adalah melakukan tinjauan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Gamplong di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian thesis ini dilakukan oleh Erisa Kurniananda pada tahun 2016.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Memenuhi Aspek Maqashid melalui Pendekatan Assed Based Community Development. Penelitian ini dilakukan oleh Wildan Arif tahun 2019.
3. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ceking Di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan oleh Fatrisia Yulianie tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris dan terkontrol (Zulkarnain, 2019:7). Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian yang diteliti pada penelitian ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata Gerbang Banyu Langit di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilaksanakan di Wisata Gerbang Banyu Langit Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pemilihan informan merupakan pemilihan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive*. Artinya, pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian. Informan terdiri dari individu, komunitas, dokumen, organisme ataupun lainnya yang berfungsi memberikan keterangan atau informasi untuk kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalurahan Srimulyo secara administratif berada pada wilayah Kapanewon Piyungan di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Letak geografis Desa Srimulyo berada pada rentang koordinat 1100 26' 26" BT sampai 1100 28' 59" BT dan 70 49' 13" LS sampai 70 52' 34" LS. Kalurahan Srimulyo termasuk salah satu Kalurahan yang berada di paling timur Kabupaten Bantul. Kalurahan Srimulyo memiliki luasan terbesar di Kabupaten Bantul, yakni ±1.462,33 hektar yang terbagi menjadi 22 Padukuhan. Letak wilayah Kalurahan Srimulyo sangat strategis, secara geografis Kalurahan Srimulyo diapit dan dilewati 2 sungai besar yakni sungai Opak dan Sungai Gawe, memiliki permukaan tanah yang beragam baik tanah datar maupun tanah pegunungan. Kalurahan Srimulyo juga dilalui oleh Jalan Raya Yogya —Wonosari yang dengan demikian lalu lintas dan transportasi sedemikian padat Kalurahan Srimulyo menjadi jalur alternatif dengan 3 jalur tujuan utama yakni jalur ke barat menuju Kota Yogyakarta, jalur ke utara menuju Kota Klaten, dan jalur ke timur menuju kota Wonosari. Dari keadaan geografis letak Kalurahan Srimulyo mempunyai banyak potensi karena kenampakan alam yang beragam. Ini sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kalurahan dengan menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan aset kalurahan. Pengelolaan sumber daya alam dan potensi Kalurahan dengan melibatkan masyarakat kalurahan melalui program pemberdayaan. Dalam Visi-Misi Kalurahan Srimulyo, program desa wisata merujuk pada Visi Kalurahan Srimulyo yaitu "Sejahtera". Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang tidak mengalami kemiskinan, kondisi ekonomi baik dan kondisi lingkungan yang sehat. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata mewujudkan kemandirian ekonomi dengan cara memanfaatkan potensi wisata di kalurahan untuk dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata mewujudkan kemandirian ekonomi dengan cara memanfaatkan potensi wisata di kalurahan untuk dikelola dengan baik.

Pembahasan

Semenjak ditetapkannya Gerbang Banyu Langit menjadi kawasan wisata sesuai dengan visi-misi kalurahan tentang pengembangan desa wisata, masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Srimulyo bahu-membahu untuk mengembangkan dan menjaga keberadaan Wisata Gerbang Banyu Langit. Dalam peningkatan kapasitas pengelola desa wisata gerbang banyu langit meliputi aspek bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. Bina Usaha

Pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan bina manusia adalah sebagai upaya untuk penguatan dan pengembangan kapasitas yang meliputi kapasitas individu, kapasitas kelembagaan dan system jejaring (Utang Rosidin, 2019:72-74). Partisipasi masyarakat dalam bina manusia adalah sarana untuk memperoleh informasi berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata. Bina manusia merupakan penambahan daya dan kekuatan untuk menjadi cukup kuat agar pelaku wisata memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang berhubungan dengan pariwisata. Selain itu, bina manusia adalah proses memperkuat yang lemah, membangkitkan keterampilan dalam kehidupan manusia yang sebelumnya tidak adanya kreativitas dan usaha, dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas dan aksi nyata untuk memetakan tujuan dan kebutuhan. Pemberdayaan adalah suatu proses dimana orang menjadi kuat untuk berpartisipasi untuk memperoleh keterampilan, ilmu pengetahuan, yang mampu untuk berpengaruh terhadap kehidupan secara individu atau kelompok. Kalurahan Srimulyo adalah kalurahan yang mengunggulkan potensi alam sebagai potensi wisata. Dalam pengembangan wisata, Pemerintah Kalurahan Srimulyo melakukan berbagai upaya untuk menggali potensi alam yang dapat dijadikan potensi wisata melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata.

Bina manusia yang dilakukan dengan pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepada pengelola desa wisata baik pokdarwis, pengelola wisata Gerbang Banyu Langit dan pelaku usaha. Bina manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Namun pemerintah kalurahan mengalami kesulitan dalam hal penganggaran, termasuk untuk pembiayaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemerintah Kalurahan Srimulyo melalui pokdarwis menjalin kerjasama dengan dinas terkait dan pihak ketiga.

2. Bina Usaha

Bina usaha memegang peran penting dalam setiap pemberdayaan karena memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan, yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. (Utang Rosidin, 2019:73). Bina usaha dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata Gerbang Banyu Langit didasari oleh pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari sehingga muncul alternatif-alternatif inovasi dalam pemenuhan kebutuhan usaha dalam bidang wisata. Masyarakat telah banyak memanfaatkan jaringan sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun aktivitas yang ada pada saat ini muncul secara spontan atau inisiatif sendiri, tetapi semua itu tergantung dari pemimpin dalam hal ini Pemerintah Kalurahan untuk menggerakkan partisipasi dan aksi dari masyarakat khususnya pelaku wisata. Pemerintah ikut andil dan berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat pelaku wisata untuk berkembang meningkatkan kesejahteraan lokal melalui ide-ide atau gagasan yang dimiliki untuk memperbaiki ekonomi serta mengedepankan nilai-nilai social yang baik di masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan, penciptaan peluang berusaha sesuai dengan keinginan masyarakat. masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat (Aprilia, 2015:24)

Bina usaha dilakukan dengan pemasaran wisata menggunakan administrasi digital dan melibatkan komunitas-komunitas, Pemerintah Kapanewon Piyungan, Pemerintah Kabupaten dan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu, bina usaha adalah dengan menambah fasilitas usaha berupa spot-spot wisata kekinian, dan inovasi agar mampu bersaing dengan wisata lokal lainnya

3. Bina Lingkungan

Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata harus memiliki dampak yang sangat nyata terhadap lingkungan dalam menghadirkan ketahanan ekonomi budaya dan sosial kemasyarakatan. Menumbuhkan partisipasi masyarakat harus selaras dan seimbang dengan budaya dan lingkungan. Selain itu langkah yang diambil oleh pengelola desa wisata harus mengedepankan kemampuan masyarakat untuk mengelola secara mandiri potensi wilayah yang ada dengan kesepakatan bersama atau aturan yang nyata merupakan langkah yang harus ditempuh Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkannya.

Pariwisata yang maju didukung oleh lingkungan yang baik. Bina Lingkungan adalah terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang berkaitan dengan perlindungan, pelestarian, dan Pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup (Utang Rosidin, 2019:73). Pengembangan kapasitas lingkungan merupakan faktor pendukung pengembangan kapasitas usaha. Hal ini sangat penting karena pelestarian lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu investasi. Bukan hanya lingkungan fisik saja tetapi lingkungan social juga sangat berpengaruh.

Wisata Gerbang Banyu Langit adalah wisata dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, diantaranya kawasan sungai. Tentunya dalam mengembangkan potensi wisata di kawasan sungai harus memperhatikan lingkungan dan pelestarian alam yang ada, guna mewujudkan pembangunan wisata yang berkelanjutan.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Mempersiapkan kawasan wisata bukan hanya mempersiapkan pembangunan fisik saja, melainkan menyangkut aspek perencanaan dan pengelolaannya. Selain itu perencanaan perlunya kebijakan yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta menggali tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bina lingkungan yang dilakukan dengan membangun potensi-potensi lingkungan yang ada, menerapkan sesuai visi-misi kalurahan, memberikan pemahaman kepada pelaku wisata baik pokdarwis, pengelola wisata dan masyarakat pelaku usaha tentang implementasi sapta pesona. Selain itu pemerintah kalurahan memberikan dukungan berupa fasilitas-fasilitas pendukung wisata di Gerbang Banyu Langit.

4. Bina Kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata social atau organisasi social apabila memiliki empat komponen yaitu person, kepentingan, aturan dan struktur. Keempat komponen tersebut harus saling mengisi dalam kelembagaan. Apabila terdapat salah satunya yang bersifat lemah, maka lembaga tersebut tidak dapat berjalan sesuai fungsinya. Setiap manusia dalam masyarakat memiliki potensi atau bakat yang harus dikembangkan. Artinya tidak ada sama sekali masyarakat yang tidak bisa melakukan apa-apa. Pemberdayaan dalam konteks bina lembaga adalah upaya untuk membangun manusia dengan kepentingan dan aturan serta manusia itu sendiri sebagai subyeknya dalam sebuah struktur organisasi (Utang Rosidin, 2019:73).

Kelembagaan adalah organisasi sosial yang meliputi individu dan kelompok, memiliki aturan dan mempunyai susunan atau struktur yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan bina kelembagaan adalah bagaimana mengarahkan lembaga tersebut agar sesuai dengan tujuan dan tugasnya masing-masing. Bina kelembagaan dalam peningkatan kapasitas pengelola desa wisata gerbang banyu langit sangat perlu karena untuk mengatur susunan dan tatanan beserta aturan yang ada agar dijalankan dengan sebaik mungkin. Dalam bina lembaga harus menggunakan pendekatan-pendekatan baik secara organisasi maupun individu. Bina lembaga dalam pemberdayaan masyarakat pelaku wisata di Gerbang Banyu Langit dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai organisasi tertinggi di Pemerintahan.

Bina lembaga dilakukan dengan menerapkan visi-misi organisasi, menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata. Selain itu kalurahan memonitoring kegiatan melalui pokdarwis dan perwakilan perangkat kalurahan. Namun pelaksanaan bina lembaga menemui kendala yaitu belum adanya Peraturan Kalurahan (Perkal) untuk pengelolaan wisata di Kalurahan Srimulyo sehingga pelaksanaannya masih menginduk pada aturan mandiri masing-masing pengelola wisata.

KESIMPULAN

Bina manusia yang dilakukan dengan pelatihan-pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Bina usaha dilakukan dengan pemasaran wisata menggunakan administrasi digital dan melibatkan komunitas, inovatif dan kreatif. Bina lingkungan dengan membangun potensi-potensi lingkungan yang ada, menerapkan sesuai visi-misi kalurahan, implementasi sapta pesona, dan dukungan berupa fasilitas-fasilitas wisata di Gerbang Banyu Langit. Bina lembaga dilakukan dengan menerapkan visi-misi organisasi, menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata. Selain itu kalurahan memonitoring kegiatan melalui pokdarwis dan perwakilan perangkat kalurahan.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya pembiayaan dan belum adanya aturan tentang pengelolaan desa wisata. Pada tahap bina manusia perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan memberikan pelatihan secara berkala agar kualitas sumber daya manusia pelaku wisata di Gerbang Banyu Langit menjadi sumber daya manusia yang unggul di bidang pariwisata. Untuk pemberdayaan pelaku wisata Gerbang Banyu Langit, pemasaran wisata lebih luas lagi, update kegiatan dan menambah fasilitas-fasilitas spot wisata yang menarik pengunjung. Untuk bina lingkungan wisata Gerbang Banyu Langit, pemerintah kalurahan perlu menambah sumber pendanaan dari luar untuk menambah fasilitas-fasilitas penunjang wisata dan memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan sapta pesona. Untuk bina lembaga di Gerbang Banyu Langit, pemerintah kalurahan perlu segera membuat peraturan kalurahan sebagai acuan untuk pengembangan dan operasional wisata; dan melalui pokdarwis memberikan pendampingan lebih secara terprogram demi kemajuan kawasan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggit Kurnia Prihasta . 2020. *Pengembangan Desa Wisata berbasis Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan*. Jurnal Fakultas Ilmu Pemerintahan. UMY : Ilmu Pemerintahan. Volume 7:1
- Anwas, M.Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Aprilia, Theresia. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Badan Pusat Statistik Jumlah Desa/Kalurahan Tahun 2019 , dalam: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1 , Diunduh 20 Mei 2021

Bintarto, R. 2011. *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.

Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2019. *Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. 13 : 73-84.

Erisa Kurniananda. 2016. Tesis. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Gamplong di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* . APMD: Magister Ilmu Pemerintahan.

Gerbang Banyu Langit, dalam: <https://visitingjogja.com/28247/liburan-dipinggir-kali-opak-gerbang-banyu-langit/> , Di Unduh 21 Mei 2021

Fatrisia Yulianie. 2015. Tesis. *Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ceking Di Kabupaten Gianyar*. Universitas Udayana : Program Pasca Sarjana.

Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan*. Sulsel : De La Macca.

I Ketut Suwena. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Setia.

I Made Laut Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Quadrant.

Kearifan Lokal, dalam: <https://pakdosen.co.id/kearifan-lokal/> , Diunduh 22 Mei 2021

Lubis, Zulkarnain. 2019. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Murdiastuti, Anastasia. 2014. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Democratic Berbasis Governance*. Surabaya : Pustaka Radja.

Maskun, Sumitro . 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Media Widya Mandala.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Neonbasu, Gregor. 2020. *Sketsa Dasar Manusia Mengenal Manusia dan Masyarakat*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Rangga, Icu. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pengembangan Desa Wisata Gianyar Tourism , dalam: <http://diparda.gianyarkab.go.id/index.php/en/news/item/304-pengembangan-desa-wisata> , Diunduh tanggal 21 Mei 2021)

Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan

Profil Wilayah Desa Srimulyo, dalam: <https://srimulyo.com/index.php/artikel/2020/8/9/profil-wilayah-des> Di Akses tanggal 18 April 2021 pukul 00.25

Konsep Penduduk Miskin Badan Pusat Statistik , dalam: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diunduh 15 Mei 2021)

Sapta Pesona dalam <https://disparbud.kamparkab.go.id/sapta-pesona-pariwisata-indonesia/?msclkid=292cfd1acf4e11ecab744b7afd7a0e69>, di unduh tanggal 1 Mei 2022

Soekanto, Soerjono . 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV

Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.

Suryabrata, Sumardi. 2019. *Metodologi Penelitian*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Susanto.2010. *Filsafat Ilmu*. Jakarta : Bumi Aksara.

Tadjuddin Noer Effendi. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana.

Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Kebijakan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Wildan Arif. 2019. Tesis. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Memenuhi Aspek Maqashid melalui Pendekatan Assed Based Community Development (Studi pada desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang Jawa Timur)*. UIN Maulana Malik Ibrahim : Program Magister Ekonomi Syariah.
- Zaki Mubarak. 2019. Tesis. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.